

**TESIS**

**ANALISA EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)  
DI KAWASAN LUWU**

***AN ANALYSIS OF IMPLEMENTATION EFFECTIVENESS OF COAST  
COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT PROGRAM (PEMP)  
IN LUWU AREA***

**I H L A S**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**ANALISA EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)  
DI KAWASAN LUWU**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi  
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Disusun dan diajukan oleh

**I H L A S**

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**



## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihlas  
Nomor Mahasiswa : P0201211003  
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,  
Yang menyatakan

Ihlas

## PRAKATA

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, hidayah dan inayah yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penelitian ini mengkaji tentang efektifitas implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) yang ada di Kawasan Luwu meliputi Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah menganalisis efektifitas implementasi program PEMP, pengelolaan LEPP-M3, dan faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pengelolaan program PEMP dan diharapkan menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah dalam rangka evaluasi, monitoring dan perbaikan terhadap program PEMP yang masih berjalan, menjadi referensi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan program pemberdayaan khususnya pada masyarakat pesisir dan kaum nelayan.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik berkat arahan dan bimbingan dari Komisi Penasehat, serta dukungan dari berbagai pihak oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku ketua komisi penasehat (Pembimbing I), Dr. Ir. Muhammad Rijal Idrus, M.Sc (Pembimbing II), Prof.Dr.Ir. Yusran Nur Indar, M.Phill, Dr. Ir. Dewi Yanuarita, M.Si dan Dr. Andi Adri Arief, S.Pi, M.Si selaku anggota komisi penasehat.

2. Dr. Ir. Roland A Barkey selaku ketua program studi perencanaan pengembangan wilayah, Prof.Dr.Ir. Yusran Nur Indar, M.Phill selaku ketua konsentrasi manajemen kelautan, para dosen dan staf program pascasarjana Unhas.
3. Rekan seperjuangan mahasiswa pascasarjana Manajemen Kelautan angkatan 2011, 2010, 2012 dan 2013.
4. Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, pengurus LEPP-M3 Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur serta segenap pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Teristimewa kepada orang tua tercinta (Bapak, Ibu, Mertua), sanak saudara atas doa, nasihat dan dukungannya serta terkhusus buat Istri dan putra-putri tercinta atas kesabaran, doa, dukungannya selama studi hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis mengucapkan syukur alhamdulillah dan berharap semoga studi ini bernilai ibadah serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perbaikan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan kaum nelayan.

Makassar, Nopember 2013

I H L A S

## ABSTRAK

**IHLAS.** *Analisa Efektifitas Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kawasan Luwu (dibimbing oleh Jamaluddin Jompa dan Muhammad Rijal Idrus).*

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Luwu meliputi Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan kabupaten Luwu Timur sejak bulan Mei hingga September 2013 dengan tujuan untuk (1) menganalisis efektifitas implementasi proses pelaksanaan program PEMP, (2) menganalisis efektifitas implementasi pengelolaan program PEMP pada Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3). Metode penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah bersifat kuantitatif dengan data berupa angka (numerik) yang dianalisis secara statistik dan diwujudkan dalam bentuk tabel, grafik dan diagram (Usman,dkk., 1996).

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi proses pelaksanaan program PEMP di Kawasan Luwu dalam pencapaian tujuan penyaluran dana ekonomi produktif (DEP) secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran pada setiap tahun anggaran PEMP adalah; di Kabupaten Luwu pada tahun 2001, 2004, 2005 didapatkan nilai indeks (100,00 %) sehingga dapat dikategorikan (efektif), tahun 2006 nilai indeks 66,67 % (kurang efektif), di Kota Palopo tahun 2004 dengan nilai indeks 100,00 % (efektif), tahun 2007, 2008 nilai indeks 66,67 % (kurang efektif), di Kabupaten Luwu Utara tahun 2003 dengan nilai indeks 100,00 % (efektif), tahun 2007 dengan nilai indeks 66,67 % (kurang efektif), di Kabupaten Luwu Timur tahun 2005 dan 2006 dengan nilai indeks 66,67 % (kurang efektif)..

Implementasi pengelolaan program PEMP pada LEPP-M3 dengan tujuan penguatan kelembagaan, pengembangan kultur kewirausahaan, diversifikasi usaha dan penggalangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, di Kabupaten Luwu Utara didapatkan nilai indeks tertinggi (70,83 %) yang dapat dikategorikan efektif, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) yang memberikan silver trophy kategori pemberdayaan ekonomi pada tahun 2012 (Fajar, 2012). Nilai indeks untuk Kabupaten Luwu (29,17 %), Kota Palopo (25,00 %), Kabupaten Luwu Timur (33,33 %) sehingga ketiganya dikategorikan tidak efektif

Kata Kunci : Efektifitas, Program PEMP, Masyarakat Pesisir

## **ABSTRACT**

**IHLAS.** *An Analysis of Implementation Effectiveness of Coast Community Economic Empowerment Program (PEMP) In Luwu Area* (supervised by **Jamaluddin Jompa** and **Muhammad Rijal Idrus**).

This research aims to (1) analyze the effectiveness of the implementation of PEMP, (2) analyze the effectiveness of the implementation of PEMP program management on Economic Institute of Micro Partner Mina Coast Empowerment (LEPP - M3 )

This research was conducted in Luwu area, covered Luwu regency, Palopo city, Luwu North regency and East Luwu regency from May to September 2013. The research method used was quantitative approach with numerical data and analyzed statistically and turned into tables forms graphics and diagrams.

The result reveal that the implementation process of PEMP in North Luwu of distributing productive economy fund is carried out puncutually. In Luwu Regency in 2001 , 2004 , 2005 the index value was (100.00 %) can be categorized (effective), but in 2006 index value was 66.67 % (less effective).In 2007, 2008 index value was 66.67 % (less effective). In North Luwu Regency in 2003 index value was 100.00 % (effective), in 2007 index value was 66.67 % (less effective). In East Luwu Regency in 2005 and 2006 index value 66.67 % ( less effective ). The implementation of PEMP program management on LEPP-M3 with the purpose of empowering the institution, enterpreneurship clture developmen, diversification of business, and public participation support, in activity empowering public, in North Luwu regency is found the highest index value (70.83 %) can be categorized (effective). This was in accordance with the research carried out by Fajar Institute of Pro Autonomy ( FIPO ) which give silver trophy of economic empowerment category in 2012(Fajar, 2012). Index value for Luwu regency is (29.17 %) , Palopo city (25.00 %), East Luwu regency (33.33 %) can be categorized not ineffective

*Keywords : Effectiveness, PEMP Program, Coastal Communities.*



## DAFTAR ISI

	halaman
PRAKATA .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Ruang Lingkup .....	5
F. Kerangka Pikir .....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Pemberdayaan Masyarakat .....	7
B. Masyarakat Pesisir menjadi bagian dari program pemberdayaan .....	8
C. Sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir .....	9
D. Sumberdaya pesisir dan laut Indonesia menunjang pemberdayaan masyarakat pesisir .....	10
E. Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir .....	11
F. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)	13
1. Filosofi dasar program PEMP .....	13

2. Tujuan dan sasaran program PEMP .....	15
3. Tahapan program PEMP.....	16
4. Periode pelaksanaan program PEMP .....	18
5. Kegiatan pada program PEMP .....	19
6. Kelembagaan program PEMP .....	21
7. Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) .....	22
8. Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) .....	23
G. Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan program .....	23
1. Efektifitas pengelolaan program .....	23
2. Efisiensi pengelolaan program .....	25
H. Implementasi Program .....	26
I. Definisi dan istilah .....	27
 III. METODE PENELITIAN .....	 30
A. Lokasi dan Waktu .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Populasi dan Sampel .....	31
D. Jenis dan Sumber data .....	31
E. Metode pengumpulan data .....	34
1. Data Sekunder .....	34
2. Data Primer .....	34
F. Teknik Pengolahan data dan Analisis data .....	34
1. Pengolahan data .....	35
2. Analisis data .....	35
 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	 42
A. Gambaran umum lokasi penelitian .....	42
1. Kabupaten Luwu .....	42
2. Kota Palopo .....	43
3. Kabupaten Luwu Utara .....	44

4. Kabupaten Luwu Timur .....	45
B. Hasil pengelolaan program PEMP pada LEPP-M3 .....	46
a. Pada Dimensi Kelembagaan .....	46
b. Pada Dimensi Ekonomi .....	49
c. Pada Dimensi Sosial .....	56
C. Efektifitas implementasi proses pelaksanaan Program PEMP .....	59
D. Efektifitas pengelolaan Program PEMP pada LEPP-M3 .....	63
E. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan program MEMP .....	67
a. Faktor pendukung keberhasilan pengelolaan.....	67
b. Faktor penghambat keberhasilan pengelolaan.....	70
V. PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>halaman</b>
1. Parameter, Jenis dan sumber data untuk analisis proses pelaksanaan program PEMP .....	32
2. Parameter, jenis dan data untuk analisis pengelolaan program PEMP pada LEPP-M3 .....	33
3. Nilai indeks dan kategori efektifitas implementasi program PEMP.	37
4. Indikator, parameter, kriteria, dan skor yang digunakan untuk analisis efektifitas proses pelaksanaan program PEMP.....	38
5. Indikator, parameter, kriteria dan skor yang digunakan untuk analisis efektifitas pengelolaan LEPP-M3 .....	39
6. Nilai indeks dan kategori efektifitas implementasi proses Pelaksanaan program PEMP.....	63
7. Nilai indeks pada setiap dimensi dan parameter pengelolaan LEPP-M3 .....	66
8. Nilai indeks dan kategori efektifitas pengelolaan LEPP-M3 .....	67
9. Faktor pendukung, dampak dan solusi pengembangan PEMP.....	70
10. Faktor pendukung, dampak dan solusi pengembangan PEMP.....	73

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>halaman</b>
1. Grafik Modal DEP .....	4
2. Grafik Usia pengelolaan LEPP-M3 .....	4
3. Kerangka pikir penelitian .....	6
4. Lokasi penelitian .....	30
5. Grafik usia pengelolaan LEPP-M3 .....	49
6. Bangunan Kedai Pesisir Luwu yang sudah tidak beroperasi .....	50
7. Kantor LEPP-M3 Luwu Utara bersama LKM dan Kedai Pesisir .....	53
8. Kedai Pesisir Luwu Utara di pasar sentra Masamba .....	53
9. Sarana pengangkutan barang milik LEPP-M3 Luwu Utara .....	54
10. Kapal Inka Mina 483 (purse seine) milik LEPP-M3 Luwu Utara .....	54
11. Kantor LEPP-M3 Luwu Timur .....	55
12. Kedai Pesisir Luwu Timur .....	55
13. SPDN LEPP-M3 Luwu Timur .....	55
14. Grafik Modal DEP LEPP-M3 .....	56
15. Grafik asset LEPP-M3 .....	56
16. Grafik Jumlah penyaluran DEP .....	58
17. Grafik Jumlah pengembalian DEP .....	58
18. Grafik Jumlah tabungan masyarakat pada LEPP-M3 .....	58
19. Grafik Jumlah modal swasta pada LEPP-M3 .....	58
20. Grafik penambahan nasabah LEPP-M3 .....	59

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Nomor</b>	<b>halaman</b>
1. Hasil penilaian skor dan indeks proses pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Luwu .....	81
2. Hasil penilaian skor dan indeks proses pelaksanaan program PEMP di Kota Palopo .....	83
3. Hasil penilaian skor dan indeks proses pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Luwu Utara .....	85
4. Hasil penilaian skor dan indeks proses pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Luwu Timur .....	86
5. Hasil penilaian skor dan indeks pengelolaan LEPP-M3 di Kabupaten Luwu .....	87
6. Hasil penilaian skor dan indeks pengelolaan LEPP-M3 di Kota Palopo .....	89
7. Hasil penilaian skor dan indeks pengelolaan LEPP-M3 di Kabupaten Luwu Utara .....	91
8. Hasil penilaian skor dan indeks pengelolaan LEPP-M3 di Kabupaten Luwu Timur .....	93
9. Hasil penilaian keunggulan pengelolaan LEPP-M3 .....	95
10. Jumlah Modal DEP, Modal Swasta, Pinjaman Masyarakat, DEP Kembali, Asset, Tabungan masyarakat dan usia Usia pengelolaan LEPP-M3 .....	96
11. Jumlah Nasabah (awal, akhir, penambahan) pada LEPP-M3 ....	96
12. Format kuisisioner .....	97
13. Daftar Riwayat Hidup .....	102

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan sebuah bentuk kehidupan yang memiliki banyak keterbatasan seperti keterbatasan kepemilikan harta benda, pendapatan, pendidikan dan bahkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti kebutuhan makan dan biaya kesehatan. Hingga saat ini kemiskinan masih menjadi persoalan bangsa dan bahkan persoalan dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2007 penduduk miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta jiwa atau sebesar 15,42 % dari jumlah penduduk yang mencapai 226 juta jiwa, dan 63,47 % diantaranya adalah masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan pedesaan. Pada tahun 2012 angka kemiskinan turun menjadi 29,12 juta jiwa atau sebesar 11,33 % dari jumlah penduduk yang mencapai 257 juta jiwa (BPS, 2012). Data tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka berbagai pihak telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di wilayah pesisir, tercatat kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP), program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan perikanan (PNPM-KP), pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP), yang dilaksanakan oleh

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI), program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP), Care International, International Fund For Agriculture Development (IFAD) masing-masing dengan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya, serta beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan secara swadaya oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Program PEMP merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang pernah menjadi unggulan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) pada tahun 2001 hingga tahun 2009. Konsep dari program PEMP adalah memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir dan laut, penguatan kelembagaan yang nantinya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan memandirikan masyarakat. Dengan program yang berpihak kepada masyarakat tersebut, sehingga pemerintah mengalokasikan dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam bentuk dana ekonomi produktif (DEP) pada program PEMP.

Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur adalah daerah yang memiliki wilayah pesisir dan berada pada satu kawasan yaitu Kawasan Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan. Keempat daerah tersebut telah menerima dan melaksanakan program PEMP sejak tahun 2001. Dalam pelaksanaannya terdapat daerah yang dapat menjalankan program PEMP lebih lama dibanding lainnya, sehingga dalam pelaksanaannya tentu terdapat hal yang



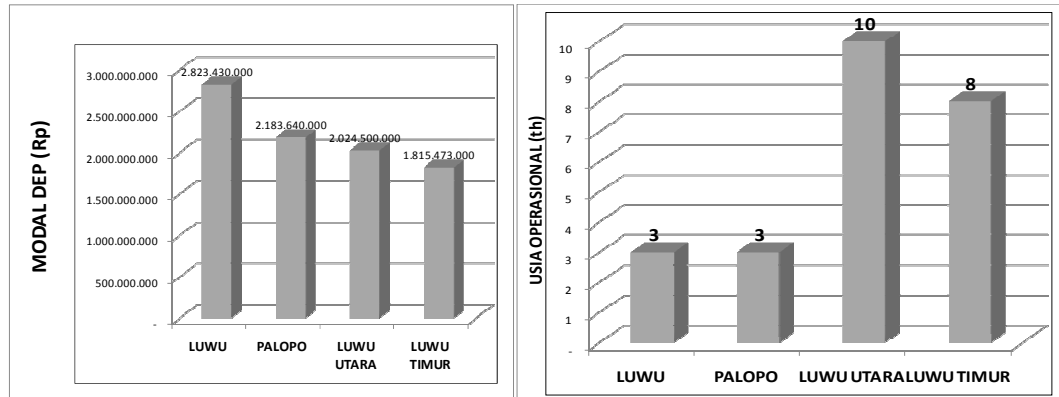
berbeda. Untuk mengetahui implementasi program PEMP di daerah tersebut, dianggap perlu melakukan suatu kajian agar hasilnya dapat dijadikan bahan rujukan dalam rangka perbaikan program-program pemberdayaan masyarakat, utamanya kepada masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan kaum nelayan.

## **B. Rumusan Masalah**

Program PEMP yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, telah dilaksanakan di Kawasan Luwu sejak tahun 2001 hingga tahun 2013 (pada saat penelitian dilaksanakan) baik proses pelaksanaan program dalam hal ini penyaluran DEP disetiap tahun anggaran, maupun hasil pelaksanaan program yang dapat dilihat melalui hasil kinerja Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3). LEPP-M3 merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk melalui program PEMP yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian di wilayah pesisir dengan tugas utama mengelola perguliran DEP kepada masyarakat, maupun pengembangan usaha yang dapat menunjang pengelolaan usaha masyarakat.

Hingga tahun 2013, hasil pelaksanaan program PEMP di empat daerah tersebut, diketahui bahwa ada LEPP-M3 yang masih menjalankan program PEMP meskipun dengan modal awal yang lebih sedikit, namun ada pula yang sudah tidak operasional lagi meskipun dengan modal awal yang lebih besar (Gambar 1,2). Hal tersebut terjadi diduga akibat adanya

proses pelaksanaan dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan tujuan program PEMP.



Sumber : Data sekunder setelah diolah, 2013

Gambar 1. Grafik modal DEP

Gambar 2. Grafik Usia pengelolaan LEPP-M3

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimanakah efektifitas implementasi proses pelaksanaan program PEMP di Kawasan Luwu ?
2. Bagaimanakah efektifitas pengelolaan program PEMP pada masing-masing LEPP-M3 di Kawasan Luwu ?
3. Faktor apa sajakah yang mendukung atau menghambat pengelolaan program PEMP di Kawasan Luwu ?

### C. Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis efektifitas proses pelaksanaan program PEMP di Kawasan Luwu

2. Menganalisis efektifitas pengelolaan program PEMP pada masing-masing LEPP-M3 di Kawasan Luwu
3. Menganalisa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan program PEMP di Kawasan Luwu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaatan dari penelitian ini adalah :

1. Menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah dalam rangka evaluasi, monitoring dan perbaikan terhadap program PEMP yang masih operasional di wilayah kajian
2. Menjadi referensi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki kajian relevan
3. Menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan program-program pemberdayaan masyarakat, terutama untuk masyarakat pesisir dan kaum nelayan.

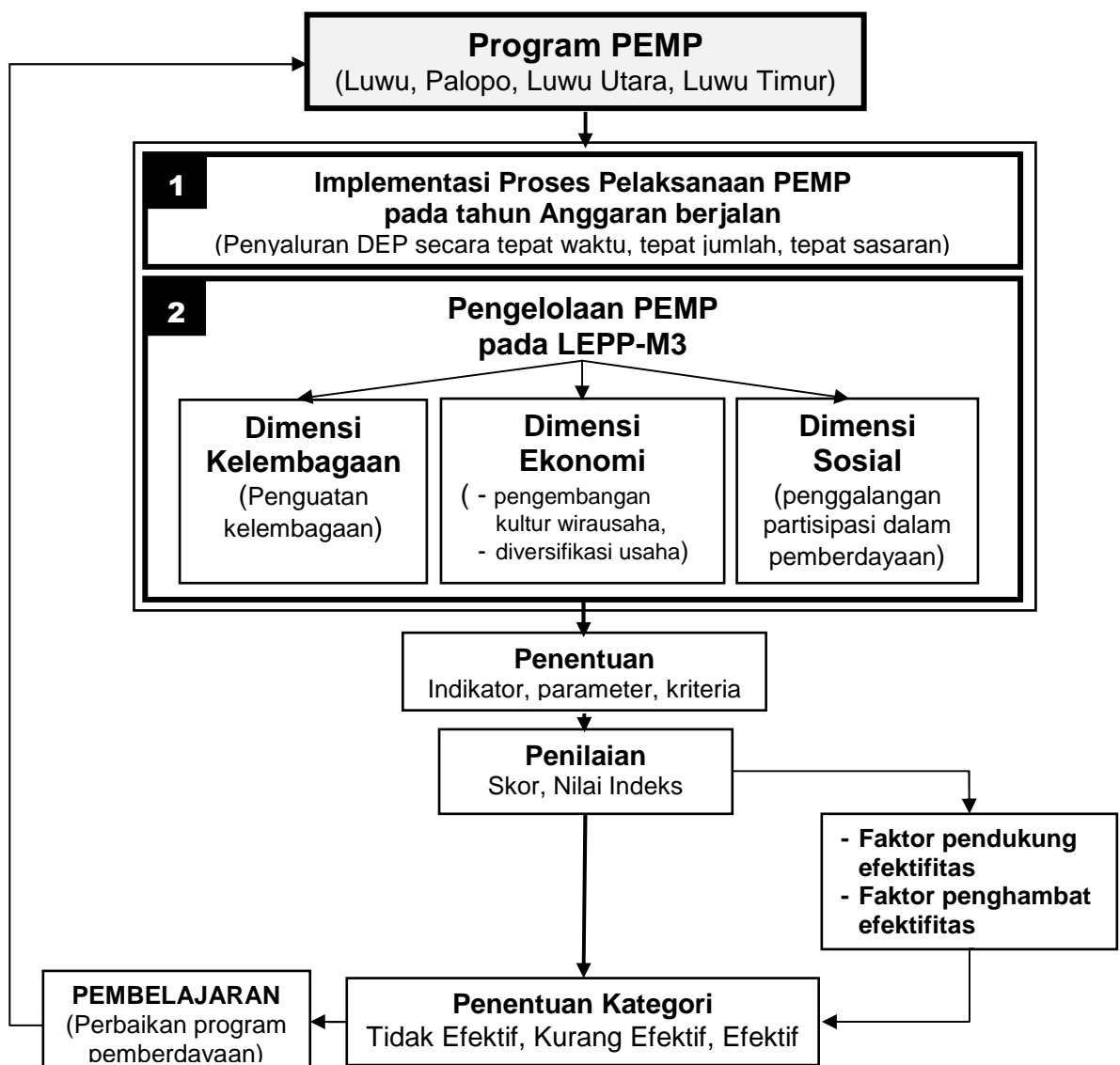
#### **E. Ruang Lingkup**

Program PEMP adalah program dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang telah dirancang dilaksanakan pada tahun 2001 hingga tahun 2009 (9 tahun), sehingga di tahun 2013 secara nasional program PEMP telah berakhir. Namun di beberapa tempat kegiatan dan kelembagaan yang terbentuk melalui program PEMP masih ada yang berjalan. Dinas Kelautan dan Perikanan atau dinas terkait lainnya adalah instansi pemerintah yang melaksanakan proses penyaluran DEP tahap awal dan LEPP-M3 adalah lembaga ekonomi yang secara khusus

dibentuk pada program PEMP untuk melaksanakan program pasca tahun anggaran berjalan (DKP, 2003), sehingga lingkup penelitian ini adalah analisa efektifitas implementasi program PEMP berdasarkan data hasil pelaksanaan program PEMP sejak tahun 2001 hingga tahun 2012/2013 pada dinas terkait dan LEPP-M3 serta informasi dari masyarakat yang mengetahui tentang program PEMP.

## F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini sebagaimana disajikan pada (Gambar 3).



Gambar 3. Kerangka Pikir penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi dan kemampuan yang mereka miliki dan pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut pada dua elemen yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat, 2002).

Pengembangan masyarakat merupakan bagian integral dari pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut bagi kemakmuran masyarakatnya, oleh karena itu penyelesaian perlu dilakukan melalui strategi yang komprehensif dengan menempatkan sistem sosial-ekonomi dan budaya yang sudah melekat didalam masyarakat sebagai faktor pendorong perubahan. Perkembangan ini pada muaranya akan meningkatkan harkat sumberdaya manusia, kualitas dan sistem atau pranata sosial masyarakat (Hidayat, dkk., 2004).

Dalam kamus bahasa Indonesia pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya, memiliki kekuatan dan tenaga untuk menguasai sesuatu. Oleh karena itu pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memiliki atau menguasai kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik (DKP, 2001).

## **B. Masyarakat Pesisir menjadi bagian dari program pemberdayaan**

Masih menjadi wacana umum bahwa kehidupan masyarakat pesisir dipersepsikan sebagai masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2007 penduduk miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta jiwa atau sebesar 15,42 % dari jumlah penduduk yang mencapai 226 juta jiwa, dan 63,47 % diantaranya adalah masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan pedesaan. Hingga tahun 2012 penduduk miskin Indonesia masih mencapai 29 juta jiwa atau sebanyak 11,33 % dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 257 juta jiwa.

Secara umum nelayan lebih miskin dibandingkan dengan petani. Hal ini terutama disebabkan oleh : (1) Tataan alam yang dihadapi nelayan sangat berat, termasuk faktor musim, (2) Pola kerja yang homogen dan bergantung hanya pada satu sumber penghasilan, (3) Keterbatasan penguasaan modal, perahu, dan alat tangkap, (4) Keadaan pemukiman dan perumahan yang tidak memadai (5) Karakter sosial-ekonomi belum mengarah pada jasa lingkungan (Anonim, 2012).

Menurut Nikijuluw (2003), bahwa kemiskinan masyarakat pesisir paling tidak disebabkan oleh tiga hal pokok, yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan superstruktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh faktor luar atau variabel eksternal individu seperti struktur sosial-ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif, fasilitas pembangunan, teknologi dan sumberdaya

alam. Kemiskinan Superstruktural adalah kemiskinan yang disebabkan variabel kebijakan makro yang kurang berpihak pada masyarakat pesisir seperti kebijakan fiskal, moneter, hukum dan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan. Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh variabel yang melekat pada diri yang bersangkutan seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan tertentu dan ketaatan pada panutan.

### **C. Sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir**

Wilayah pesisir sesungguhnya merupakan daerah yang kaya. Kemudahan mendapatkan uang menjadikan hidup mereka lebih konsumtif. Kusumastanto (2003) mengemukakan bahwa masyarakat pesisir memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukannya seperti usaha perikanan tangkap dan pembudidaya ikan, dimana mereka sangat tergantung pada musim, harga dan pasar. Adanya budaya hidup konsumtif dan perolehan pendapatan yang kadang tidak menentu sehingga masyarakat pesisir membutuhkan lembaga penyedia dana yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi mereka.

Kondisi wilayah pesisir yang ekstrim, panas dan terbuka menjadikan mereka lebih agresif, dan mudah terpropokasi. Namun karena berada pada satu wilayah dan komunitas kecil sehingga hubungan kekerabatan dan budaya saling tolong menolong juga masih kental pada masyarakat pesisir.

#### **D. Sumberdaya pesisir dan laut Indonesia menunjang pemberdayaan masyarakat pesisir**

Indonesia sebagai negara maritim sesungguhnya memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup besar. Potensi tersebut nyata dimana luas laut Indonesia adalah 2/3 dari wilayah daratannya atau sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>. Panjang garis pantainya mencapai 95.181 km dan jumlah pulauanya sekitar 17.480. Indonesia juga merupakan pusat segitiga terumbu karang dunia atau "*The Coral Triangle*" yang merupakan kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati perairan laut. Potensinya berupa 70 genera dan 500 spesies karang. Wilayah *the Coral Triangle* tersebut meliputi enam negara yaitu Malaysia, Philipina, Timor Leste, Papua Nugini, Indonesia dan Solomon Islands (Businee News, 2011).

Potensi perikanan Indonesia dapat mencapai U\$ 173,18 Milyar/tahun terdiri dari potensi perikanan sebesar U\$ 31,93 Milyar/tahun, sumberdaya wilayah pesisir U\$ 50 Milyar/tahun, Bioteknologi U\$ 40 Milyar/tahun, Wisata Bahari U\$ 2 Milyar/tahun, Minyak Bumi U\$ 23,25 Milyar/tahun dan Transportasi Laut U\$ 20 Milyar/tahun, sumberdaya laut lainnya U\$ 5 Milyar/tahun, potensi inipun belum termanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya ada sekitar 30 % hutan mangrove dan 15 % terumbu karang dunia ada di Indonesia. Sekitar 60 % penduduk Indonesia hidup diwilayah pesisir pada 42 kota dan 181 kabupaten. Kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional sekitar 20,5 % dan sektor kelautan



dapat menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja secara langsung (Anonim, 2012).

Musawwir (2009) mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah keterbatasan kepemilikan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam dimana sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang kurang memadai akan menyebabkan kemiskinan, demikian sebaliknya sumberdaya yang cukup akan mensejahterakan masyarakat sehingga sumberdaya memiliki hubungan dengan kemiskinan. Namun berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa potensi sumberdaya pesisir dan laut begitu besar dapat mencapai U\$ 173,18 Milyar/tahun, sehingga sumberdaya alam tidak memiliki hubungan dengan kemiskinan yang terjadi di wilayah pesisir. Dalam artian bahwa sumberdaya alam bukanlah penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat yang ada di wilayah pesisir.

### **E. Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir**

Menurut Dahuri (2001), mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal ini masyarakat pesisir, paling tidak mencakup tiga aspek yaitu ; 1) pemberdayaan usaha, 2) pemberdayaan sumberdaya manusia, dan 3) pemberdayaan lingkungan.

Bengen (2001), berpendapat bahwa ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir yaitu : (1) penciptaan

lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, (2) pendekatan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*Self Financing Mechanism*), (3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna, (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat.

Menurut Soesilowati (1999), ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir yaitu; 1) Strategi Fasilitatif yaitu strategi yang mengharapkan kelompok yang menjadi sasaran suatu program sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki. Strategi ini dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu agen perubah bersama-sama masyarakat mencari penyelesaian terhadap suatu masalah, 2) Strategi Edukatif, yaitu strategi yang memberikan pengetahuan dan keahlian pada masyarakat yang akan diberdayakan, 3) Strategi Persuasif, yaitu strategi yang berupaya membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku. Strategi ini lebih cocok digunakan bila masyarakat tidak sadar terhadap kebutuhan perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan, 4) Strategi Kekuasaan, yaitu strategi yang membutuhkan agen perubah yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai akses untuk monopoli. Inti dari empat strategi pemberdayaan di atas adalah memberikan cara pengelolaan terbaik yang

harus dilakukan agar masyarakat pesisir mau dan mampu mengelola sumberdaya yang mereka miliki.

Strategi dan manajemen pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dapat dituangkan dalam bentuk program-program nyata, yang merupakan program unggulan, terencana dan komitmen yang kuat. Bentuk program nyata tersebut adalah program peningkatan kesejahteraan nelayan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengetahuan, serta pengembangan industri perikanan dan kelautan. Program PEMP adalah salah satu bentuk program nyata tersebut.

Ditinjau dari bentuk strategi, program PEMP merupakan strategi fasilitatif dalam memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan, yaitu strategi yang mengharapkan masyarakat pesisir dan nelayan sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki dan agen perubahan bersama-sama masyarakat mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Pada program PEMP, yang menjadi agen dalam perubahan adalah Tenaga Pendamping Desa (TPD).

## **F. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)**

### **1. Filosofi dasar program PEMP**

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis dengan potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terkandung didalamnya. Secara normatif, seharusnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang sejahtera mengingat sumberdaya alamnya yang begitu besar, namun pada kenyataannya sebagian besar masyarakat pesisir

terutama nelayan masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal (dipersepsikan miskin) dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu faktor yang dianggap penyebab kemiskinan masyarakat pesisir adalah kurangnya kebijakan pembangunan pemerintah di wilayah pesisir. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya infrastruktur, prasarana sosial dan perekonomian yang dapat mendukung pengembangan wilayah pesisir. Disamping itu, tingginya resiko usaha pada bidang kelautan dan perikanan serta krisis kepercayaan terhadap masyarakat pesisir turut menghambat perkembangan wilayah ini. Bukan hanya itu, adanya kebijakan pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) kian memperparah kemiskinan masyarakat pesisir utamanya kaum nelayan.

Sebagai masyarakat yang dianggap paling dirugikan dengan adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM, maka pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan mengalokasikan dana kompensasi pengurangan subsidi BBM dalam bentuk dana ekonomi produktif (DEP) yang dikemas dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) sejak tahun 2001 hingga tahun 2009. Dalam rancangan program PEMP, juga diharapkan menjadi salah satu solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di wilayah pesisir seperti keterbatasan ketersediaan modal usaha, sulitnya mendapatkan pasokan BBM (jenis solar) serta sulitnya menjangkau ketersediaan bahan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun DEP dari program PEMP bukanlah bersifat hadiah (*charity*)

melainkan pemberdayaan (*empowerment*), sehingga diharapkan dapat terus berkembang dan menyentuh sebagian besar masyarakat pesisir. Pengelolaan usaha dilaksanakan dengan model BAREV yaitu sistim bagi hasil yang digabung dengan sistim bergulir (*revolving*) yang dikelola oleh lembaga ekonomi pengembangan pesisir mikro mitra mina (LEPP-M3) bentukan kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) melalui program PEMP (DKP, 2003).

## **2. Tujuan dan Sasaran program PEMP**

Secara umum program PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Berdasarkan target pelaksanaan program PEMP, maka tujuan program PEMP terdiri dari ; pertama, tujuan dilihat dari capaian proses pelaksanaannya yaitu tersalurkannya DEP kepada masyarakat secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran disetiap tahun anggaran program PEMP (DKP, 2003), sehingga penyaluran DEP diharapkan dapat terlaksana pada setiap tahun anggaran berjalan. DEP juga merupakan bantuan langsung masyarakat (BLM) secara hibah (*block grant*) tanpa dikenakan biaya potongan pajak sehingga jumlah yang disalurkan kepada masyarakat harus sama dengan jumlah DEP yang tertuang dalam daftar alokasi anggaran. Sebagaimana konsep dan mekanisme penyaluran DEP yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan, maka sasaran DEP terdiri dari LEPP-M3 sebagai sasaran antara dan Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) sebagai sasaran utama. KMP

calon penerima DEP harus memiliki usulan rencana usaha yang akan dibiayai berupa kegiatan penangkapan ikan, budidaya ikan, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan serta pengelolaan wisata bahari yang berlokasi di daerah sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil (DKP, 2006). Kedua, tujuan dilihat dari capaian hasil pelaksanaannya yaitu kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan kelembagaan, pengembangan kultur kewirausahaan, diversifikasi usaha yang berbasis pada sumberdaya lokal dan berkelanjutan, serta penggalangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan (DKP, 2007).

Dalam jangka panjang program PEMP diarahkan pada; 1) pengembangan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir, 2) peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, dan 3) mendorong masyarakat pesisir untuk mampu mengembangkan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah (DKP, 2003).

### **3. Tahapan program PEMP**

Tahap program PEMP terdiri dari tahap persiapan (*input*), tahap pelaksanaan (*process*), dan tahap perkembangan (*output*).

**a) Tahap persiapan (*input*)**

Tahapan persiapan meliputi identifikasi potensi dan permasalahan terkait dengan sumberdaya alam (pesisir dan laut), sumberdaya manusia (nelayan, pembudidaya, pengelola lembaga keuangan, tenaga pendamping dan pemerintah), kegiatan usaha perikanan, sarana dan prasarana penunjang, serta kebijakan pemerintah.

Data dan informasi yang didapatkan kemudian dianalisis untuk menyusun program minimal terkait dengan program sosial, ekonomi, lingkungan dan infrastruktur. Rencana program kemudian disosialisasikan untuk penyamaan paham dan persepsi tentang program.

**b) Tahap pelaksanaan (*process*)**

Kegiatan pada tahapan pelaksanaan terdiri dari : 1) pemilihan calon peserta baik pendamping maupun calon masyarakat pemanfaat, 2) penyiapan sosial masyarakat terdiri dari pembentukan kelembagaan dan pendidikan dan pelatihan. Sejatinnya kelembagaan dalam program PEMP terdiri dari unsur pemerintah selaku penyedia dan pengarah program, LSM selaku pengawas, KM dan TPD selaku pendamping (fasilitator) serta LEPP-M3 dan KMP selaku pemanfaat atau lembaga ekonomi masyarakat. Tahapan pembentukan lembaga ekonomi masyarakat secara bertahap mulai dari pembentukan mitra Desa, KMP dan LEPP-M3. KMP baru dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setelah LEPP-M3 beroperasi.

Pendidikan dan pelatihan terkait dengan manajemen kelompok, pengelolaan keuangan, teknis usaha, serta pemasaran dan kemitraan dilaksanakan setelah kelembagaan ditingkat masyarakat terbentuk dan sebelum DEP disalurkan. Tahapan ini penting untuk dilakukan untuk menghindari ketidaksiapan masyarakat dalam pengelolaan program. Dan yang sangat penting juga dilakukan adalah pendampingan secara berkesinambungan hingga pelaksanaan program dapat benar-benar mandiri dalam artian masyarakat telah mendayagunakan sumberdaya yang ada dengan memanfaatkan modal usaha dari LEPP-M3 dan mengembalikan modal tersebut berdasarkan mekanisme yang telah disepakati bersama, dan LEPP-M3 juga telah berfungsi sebagai lembaga keuangan dan selaku motor penggerak ekonomi masyarakat.

**c) Tahap perkembangan (*output*)**

Tahapan perkembangan yaitu hasil pengelolaan yang dapat menunjukkan apakah modal usaha bertambah atau berkurang, peminjam bertambah atau berkurang, masyarakat secara mandiri mampu mengelola potensi sumberdaya alam yang ada diwilayahnya.

**4. Periode pelaksanaan program PEMP**

Secara periodik program PEMP dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode inisiasi (2001-2003), periode institusionalisasi (2004-2006), dan periode diversifikasi (2007-2009).



- 1) **Periode Inisiasi** merupakan periode pembangunan (rintisan), memotivasi dan memfasilitasi masyarakat pesisir agar mampu memanfaatkan kelembagaan ekonomi baik KMP maupun LEPP-M3.
- 2) **Periode Institusionalisasi** merupakan periode untuk menjadikan LEPP-M3 menjadi lembaga yang berbadan hukum seperti koperasi atau badan hukum lainnya, agar LEPP-M3 mampu mengembangkan usaha ekonomi dengan legalitasnya.
- 3) **Periode Diversifikasi** merupakan periode perluasan dan pematangan unit usaha LEPP-M3 agar pengelolaan unit usahanya lebih mandiri, profesional dan mampu bersaing dengan usaha swasta lainnya (DKP, 2006).

## 5. Kegiatan pada program PEMP

Pada mulanya kegiatan utama pada program PEMP adalah pengelolaan DEP model BAREV yaitu model bagi hasil yang digabung dengan sistem bergulir (*revolving*) yang dikelola oleh LEPP-M3, namun seiring dengan perkembangan pelaksanaan program PEMP, maka terdapat beberapa kegiatan pokok yang dijalankan LEPP-M3 seperti LKM, SPDN/SPBN, Kedai Pesisir, serta beberapa kegiatan yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan seperti Klinik Bisnis, dan bantuan usaha perikanan.

### a. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

LKM adalah unit usaha milik LEPP-M3 yang bergerak dalam bidang permodalan bagi masyarakat pesisir, terutama untuk segmen usaha

mikro dan kecil dalam bentuk usaha simpan pinjam (USP), Swamitra Mina, bank perkreditan rakyat (BPR), Baitul Qirodl yang dapat dikerjasamakan dengan perbankan yang ada diwilayah masing-masing.

**b. Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN)/ Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)**

SPDN/SPBN adalah unit usaha yang melayani kebutuhan BBM jenis solar dengan harga bersubsidi khusus untuk melayani kapal perikanan berukuran kurang dari 30 Gross Tonase atau setara dibawah 90 PK, dan jenis premium untuk kendaraan masyarakat yang ada diwilayah pesisir. SPDN/SPBN adalah program kerjasama KKP dengan pihak PT. PERTAMINA dimana SPDN/SPBN dapat dikelola oleh lembaga berbadan hukum seperti koperasi sehingga LEPP-M3 yang berbadan hukum koperasi dapat mengelola SPDN/SPBN.

**c. Kedai Pesisir**

Kedai Pesisir adalah unit usaha milik koperasi yang bergerak dalam melayani kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga lainnya bagi masyarakat pesisir. Kedai Pesisir juga dapat menjadi agen penyuplai bagi kios-kios kecil yang telah diusahakan oleh masyarakat.

**d. Klinik Bisnis**

Klinik Bisnis adalah unit usaha yang dibentuk untuk memberi konsultasi bisnis bagi masyarakat yang membutuhkan. Konsultasi ini

diberikan berkaitan dengan rencana bisnis, pangsa pasar, mitra usaha, dan pengembangan usaha masyarakat.

**e. Penyediaan sarana usaha perikanan**

Unit usaha penyediaan sarana usaha perikanan adalah unit milik koperasi usaha ini berupa penyediaan sarana penangkapan ikan, sarana pengolahan ikan, dan sarana produksi perikanan lainnya.

**6. Kelembagaan program PEMP**

Secara berjenjang kelembagaan program PEMP terdiri dari (1) Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai penanggungjawab program secara nasional, (2) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi sebagai penanggungjawab program ditingkat provinsi, (3) Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab program ditingkat kabupaten/kota, (4) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan atau dinas terkait sebagai penanggungjawab operasional program ditingkat kabupaten/kota, (5) Konsultan Manajemen (KM) kabupaten/kota yang didalamnya terdapat tenaga pendamping desa (TPD) yang bertugas sebagai konsultan manajemen dan pendamping masyarakat di tingkat kabupaten/kota, (6) Mitra Desa yang terdiri dari wakil aparat desa, tokoh masyarakat/agama/adat, dan penyuluh pendamping lapangan adalah mitra pendampingan di tingkat desa/kelurahan, (7) LEPP-M3 sebagai pengelola DEP dan penggerak

perekonomian di wilayah pesisir, (8) KMP sebagai penerima manfaat DEP untuk mengelola usaha sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir.

#### **7. Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3)**

LEPP-M3 adalah peristilahan dalam program PEMP yaitu lembaga ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat pesisir melalui mekanisme musyawarah yang dilakukan oleh KMP di tingkat kabupaten/kota. Pengelolaan program PEMP secara berkelanjutan dilaksanakan oleh LEPP-M3 sehingga lembaga ini diharapkan dapat menjadi *holding company* milik masyarakat pesisir sebagai penggerak ekonomi di wilayah pesisir dan dapat bersaing dengan lembaga usaha menengah yang bergerak pada sektor usaha perikanan dan kelautan. Kegiatan utama LEPP-M3 adalah mengelola perguliran DEP, selain itu diharapkan dapat mengelola usaha yang dapat menunjang pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir seperti unit usaha simpan pinjam, penyaluran BBM, Kedai Pesisir dan usaha perikanan lainnya.

Untuk dapat bersaing dengan usaha skala menengah di wilayah pesisir, maka legalitas LEPP-M3 dapat ditingkatkan secara berjenjang dari surat keputusan kepala dinas, badan hukum koperasi atau CV hingga menjadi sebuah Perseroan Terbatas (PT). Hal tersebut penting untuk menjadi nilai tawar yang baik bagi masyarakat pesisir.

## **8. Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP)**

Kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) adalah istilah dalam program PEMP yaitu kelompok terpilih baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kesamaan kegiatan usaha dan atau lokasi pemukiman. KMP merupakan penerima manfaat dari DEP untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif di wilayah pesisir.

### **G. Efektifitas dan Efisiensi pengelolaan program**

#### **1. Efektifitas pengelolaan program**

Buhari (1997), mengemukakan bahwa efektivitas diterjemahkan ketepatangunaan, hasil guna dan menunjang tujuan. Bila hal ini dikaitkan dengan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir adalah ketepatan untuk menciptakan kondisi dan potensi agar dapat memiliki kembali harkat dan martabat serta kepercayaan diri sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupannya. Jika efektifitas diartikan sebagai penunjang tujuan sedangkan tujuan diartikan sebagai unsur yang penting bagi terlaksananya suatu kegiatan organisasi, tercapainya tujuan organisasi diperlukan dukungan sumber fasilitas yang cukup yang biasanya berupa; (a) sumberdaya manusia, (b) sumberdaya alam, dan (c) sumber sosial, artinya suatu kegiatan organisasi dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuannya apabila didukung keterkaitan antara sumberdaya manusia yang profesional, fasilitas yang memadai, dan tersedianya sumber-sumber

sosial (modal sosial). Efektifitas juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya, dana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa efektifitas merupakan suatu upaya organisasi untuk mencapai tujuan yang tepat waktu dan hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sumberdaya, dana, sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Efektifitas pengelolaan program dapat dipandang sebagai upaya untuk menilai satu atau beberapa kegiatan terkait dalam konteks pengelolaan kegiatan (*program*), yaitu evaluasi dilakukan secara penuh dengan mengacu kepada masukan (*input*), kegiatan (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) (KKP, 2012). Hal senada juga diungkapkan Pomeroy *et al.*, (2005) yang mendefenisikan efektifitas pengelolaan sebagai tingkat dimana kegiatan pengelolaan mencapai tujuan dan sasarannya. Agar efektifitas pengelolaan dapat dievaluasi, maka hal yang dibutuhkan adalah membangun parameter atau kriteria yang akan diukur efektifitasnya (Syms., *et al.*, 2001). Parameter yang ditetapkan tergantung pada tujuan dan sasaran dari program yang direncanakan. Evaluasi efektifitas pengelolaan akan memberikan gambaran bagaimana memperbaiki pengelolaan melalui pembelajaran, adaptasi dan diagnosis dari masalah-masalah yang spesifik yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (Pomeroy *et al.*, 2005).

Kambuaya (2012) berpendapat bahwa efektifitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan outcome dengan output. Persamaan umum yang pernah digunakan dalam menghitung efektifitas adalah sebagai berikut :

$$Efektifitas (E) = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

## 2. Efisiensi Pengelolaan Program

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi juga merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau penggunaan sebenarnya (Danfar, 2009).

Sedangkan menurut Emerson sebagaimana dikutip Danfar (2009), efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.

## H. Implementasi Program

Implementasi adalah tindakan-tindakan oleh individu atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah diintegrasikan dalam keputusan kebijaksanaan (Wahab, 1990).

Keputusan kebijaksanaan yang dimaksud biasanya berupa program, dimana program adalah sebuah rencana aktivitas atau rencana kegiatan dalam suatu wadah tertentu. United Nation mendefinisikan program sebagai suatu hal yang mengatur aktivitas sosial dengan objek yang khusus, waktu dan tempat yang dibatasi dan selalu terdiri dari suatu hal yang bersangkutan paut pada suatu organisasi atau beberapa organisasi atau beberapa organisasi pada hal pengorganisasian dan pelaksanaannya (Bintoro 1991).

Mengutip pendapat Chema dan Rondinelli, Miraza (2009) mengatakan bahwa implementasi yaitu pelaksanaan suatu program kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa suatu proses interaksi adalah diantara merancang dan menentukan sasaran yang diinginkan. Sebuah program akan sangat menunjang implementasi, karena didalam program memuat beberapa aspek yaitu ; a) adanya tujuan yang ingin dicapai, b) adanya kebijakan yang harus diambil dalam mencapai tujuan, c) adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan proses yang harus dilalui, d) adanya perkiraan yang dibutuhkan dan adanya strategi dalam pelaksanaan.



Waluyo (2007) berpendapat bahwa program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi adalah adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut dilibatkan dan memperoleh hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberi manfaat kepada masyarakat maka boleh dikatakan program tersebut gagal.

Unsur ketiga dari implementasi program adalah adanya pelaksana. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan adalah unsur yang sangat penting karena unsur inilah yang mengelola program baik selaku pelaksana maupun selaku pengawas dalam proses implementasi.

### I. Definisi dan istilah

Program	: Kegiatan yang terencana dan terstruktur dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
PEMP	: Merupakan salah satu program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir
DEP	: Yaitu istilah yang digunakan pada program PEMP sebagai modal usaha yang dapat dipinjam secara bergulir oleh masyarakat pesisir dalam rangka pembiayaan usahanya
LEPP-M3	: Adalah organisasi ekonomi masyarakat yang dibentuk pada program PEMP untuk mengelola dana bergulir serta usaha yang terkait dengan pengembangan ekonomi di wilayah pesisir

- KMP : Yaitu organisasi ekonomi masyarakat yang dibentuk pada program PEMP untuk melakukan usaha secara bersama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
- Nasabah : Istilah yang diberikan kepada peminjam modal usaha dari LEPP-M3 baik kelompok maupun perorangan
- RTP : Rumah tangga perikanan penangkapan ikan dan budidaya ikan
- LKM : Yaitu unit usaha pada LEPP-M3 yang mengelola dana ekokomi produktif
- Usaha Mikro : Usaha produktif milik keluarga atau perorangan dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun dan dapat mengajukan kredit paling banyak Rp. 50 juta dan umumnya tidak memiliki izin usaha (Kep.Menkeu No.40./KMK.06/2003)
- Usaha Kecil : Usaha produktif berskala kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah bangunan dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1 Milyar per tahun dan dapat mengajukan kredit Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta dan umumnya memiliki izin usaha (UU No.9 tahun 1995)
- Usaha Menengah : Usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah bangunan serta dapat menerima kredit Rp. 500 juta hingga Rp. 5 Milyar (Inpres No.10 tahun 1998)
- SPDN : Yaitu unit usaha yang mengelola penyaluran bahan bakar minyak khususnya solar kepada nelayan dengan kapasitas kapal dibawah 30 Gross Tonase.
- Kedai Pesisir : Unit usaha koperasi yang melayani penjualan kebutuhan bahan rumah tangga
- DKP : Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Koperasi	: Organisasi usaha ekonomi masyarakat yang berbadan hukum koperasi
Usaha perikanan	: Usaha bidang perikanan di wilayah pesisir dan laut
Kapasitas Lembaga	: Tingkat kemampuan lembaga dalam hal status hukum dan kepemilikan asset
Tabungan masyarakat	: Adalah tabungan masyarakat yang dititipkan pada LEPP-M3
Diversifikasi usaha	: Adalah perluasan usaha dengan membentuk unit usaha baru
Efektifitas	: Tingkat pencapaian tujuan program
Implementasi	: Pelaksanaan kegiatan/program